



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Yos Soedarso No. 02 Palangka Raya 73112

Telp (0536) 3221703, Fax (0536) 3222652

Email : [disnakertrans@kalteng.go.id](mailto:disnakertrans@kalteng.go.id) Website : [www.disnakertrans.kalteng.go.id](http://www.disnakertrans.kalteng.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR : KEP.801/ 05 /Nakertrans**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN, DAN PENETAPAN PEJABAT**  
**YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMA,**  
**BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA DINAS TENAGA**  
**KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah .
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dana Perimbangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 Tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 .
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
2. Program Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 2024.
3. DPA-SKPD No.DPA/A.1/2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

4. Keputusan .....

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/8/2024 Tanggal 3 Januari 2024, Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk/mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat yang diserahi tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Para Pejabat dan Pengelola Anggaran di maksud pada diktum kesatu bertugas membantu Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

#### A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ( PPK )

- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran.
- Melakukan verifikasi SPP
- Menyiapkan SPM
- Melakukan verifikasi harian dan penerimaan.
- Melaksanakan akuntansi SKPD dan
- Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

#### B. BENDAHARA PENERIMAAN :

- Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah;
- Secara administrative atas pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

#### C. BENDAHARA PENGELUARAN :

- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah;
- Secara administrative atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku bendahara Umum Daerah (BUD)

#### D. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
- Melapor Perkembangan pelaksanaan kegiatan
  - Menyiapkan .....

- Menyiapkan dokumen pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
- Membantu menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- Membantu menyusun paket pekerjaan yang akan dilelang
- Penunjukan langsung, pengadaan langsung;
- Membantu menyiapkan Dokumen kontrak/perjanjian;
- Membantu menyiapkan laporan pengadaan barang dan jasa
- Membantu mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Membantu proses penyerahan aset hasil pengadaan Barang dan jasa dan
- Membantu menyiapkan dokumen lainnya.

KETIGA : Para Pejabat Pengelola Anggaran DPA-SKPD diberikan tunjangan operasional sesuai dengan besarnya biaya yang tersedia dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
 PADA TANGGAL : 15 Januari 2024.

KEPALA DINAS



**FARID WAJDI, A.K.S., MSW.**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 197007241992011001

Tembusan Disampaikan Kepada YTH :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Sekda Prov. Kalteng di- Palangka Raya
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Kalteng Di – Palangka Raya
4. Ketua BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.
5. Inspektur Prov. Kalteng di-Palangka Raya
6. Masing-masing yang bersangkutan.

\*Lampiran I. : Nama – nama Pejabat Pengelola Anggaran pada DPA –SKPD Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nomor : KEP.801/ 05 /Nakertrans  
 Tanggal : 15 Januari 2024

NO	UNIT KERJA/NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN STRUKTURAL POKOK	DITUNJUK SEBAGAI	DPA/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan	BESARNYA HONOR (RP) / BULAN
1	2	3	4	5	6
1.	FARID WAJDI, AKS., MSW. 197007241992011001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DPA-SKPD Disnakertrans Prov Kalteng : - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal	3.420.000,-
2.	<b>DIAGUS, ST., M.Si.</b> 19690802 199303 1 012 Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	DPA-SKPD Tahun 2024	1.520.000,-
3.	DARYONO, A.Md 19810101 201001 1 045 Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan	Bendahara Penerimaan	DPA-SKPD Tahun 2024	340.000,-
4.	SALAHUDIN, SP 19730523 200701 1 011 Penata ( III/c)	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	DPA-SKPD Tahun 2024	1.320.000,-

KEPALA DINAS

**FARID WAJDI, A.K.S., MSW.**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 197007241992011001

Lampiran 2. : Nama – nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Tahun Anggaran 2024 pada DPA–SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nomor : KEP.801/ 05 /Nakertrans  
 Tanggal : 15 Januari 2024

NO	UNIT KERJA/NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN STRUKTURAL POKOK	DITUNJUK SEBAGAI	DPA/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan	BESARNYA HONOR/ BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	HERU SETIAWAN,SP NIP. 19751016 200802 1 001 Panata Tk.I (III/d)	Perencana Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN            PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                Kegiatan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>- Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>- Koordinasi &amp; Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul> </li> <li>• <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                Kegiatan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD.</li> <li>- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</li> </ul> </li> <li>• <b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>                Kegiatan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</li> <li>- Penatausahaan BMD pada SKPD</li> </ul> </li> <li>• <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</b>                Kegiatan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidiksn &amp; Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas &amp; Fungsi.</li> </ul> </li> <li>• <b>Administrasi Umum Peraangkat Daerah</b>                Kegiatan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik./ Penerangan Bangunan Kantor.</li> <li>- Penyediaan Peralatan dan Perengkapsn Kantor.</li> <li>- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.</li> <li>- Penyediaan Barang Cetakn dan Peggandaan.</li> <li>- Fasilitasi Kunjungan Tamu.</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</li> <li>- Dukungan Pelaksanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</li> </ul> </li> <li>• <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>                Kegiatan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Mebel.</li> <li>- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</li> </ul> </li> <li>• <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                Krgiatan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air &amp; Listrik.</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</li> </ul> </li> <li>• <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                Kegiatan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.</li> </ul> </li> </ul>	2.920.000,-

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</li> <li>- Pemeliharaan Aset tak berwujud</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.</li> </ul> <p><b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.</li> <li>- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</li> </ul>	
2.	<b>Dra. KURNIA FARIDA</b> NIP. 19680717 199403 2 008	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<p><b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Pelaksanaan Pendidikan &amp; Pelatihan Keterampilan Bagi Pncaker Berdasarkan Klster Kompetensi.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah</li> </ul> <p><b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja</li> <li>- Perluasan Kesempatan Kerja</li> <li>- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Job Fair / Bursa Kerja.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan RPTKA Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sikronsasi Pengesahan RPTKA yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</li> </ul>	2.520.000,-
3.	<b>FRITMAN BANLO, S.Pt</b> NIP. 196802171999031004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<p><b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten Kota.</li> </ul> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana HI &amp; Jamsostek.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.</li> </ul> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.</li> <li>- Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</li> <li>- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi &amp; Konfederasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh Serta Non Afiliasi.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)</li> </ul>	2.520.000,-

				Kegiatan : - Penetapan Upah Minimum Provinsi.(UMP) - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitasi Kesejahteraan Pekerja.	
4.	<b>ANDI JAIRIN, SP., MAP.</b> NIP. 19741207 200901 1 004 Penata Tk.I (III/d)	Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b> • Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Kegiatan : - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan - Penegakan Hukum Ketenagakerjaan - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan.	1.610.000,-
5.	<b>IMELDA THERESIA, S.Hut</b> NIP. 197503282003122006 Penata Tk.I (III/d)	Kepala UPT BLK Buntok	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b> • Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Kegiatan : - Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Keterampilan Bagi Pncaker Berdasarkan Klster Kompetensi. - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja.	1.910.000,-
6.	<b>WELDULINE, SE, MA</b> NIP. 19800506201012011 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI.</b> • Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Pematapan. Kegiatan : - Penguatan SDM Dalam Rangka Pematapan satuan Pemukiman. - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka pematapan Satuan Pemukiman.	1.610.000,-
7.	<b>MOCHAMMAD MUKROMIN, S.Kom</b> NIP.10680913 199803 2 001 Pembina Tk.I (IV/b)	Kabid Pembangunan Permukiman dan Penataan Persebaran Penduduk	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b> • Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi Kegiatan : - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi. - Advokasi & Musyawarah Penetapan Kawasan  <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b> • Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi.  Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	1.610.000,-

KEPALA DINAS



**FARID WAJDI, A.KS., MSW.**

Rembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197007241992011001